

## ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Republika

Tanggal : 11 Mar 2013

Subyek : Sampah

Halaman : 16

### Sampah Jadi Musuh Hutan Konservasi

Kelestarian hutan konservasi terancam dengan tumpukan sampah. Di sinyalir sampah tersebut merupakan kiriman dari Jakarta.

"Masalah kita di sini cuma sampah," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan di sela acara kunjungan hutan konservasi ke Pulau Rambut di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (9/3).

Menurut Zulkifli, sampah merupakan masalah serius yang bisa merusak kelestarian alam. Untuk mencegah kerusakan le bih parah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sampai harus membeton pinggiran pantai untuk menjaga tumbuhan mangrove tetap tumbuh. "Bagaimana jika mangrove mati?" kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, tanaman mangrove memiliki akar tunjang. Tumpukan sampah yang dibawa gelombang laut dari Jakarta akan menutupi tanaman tersebut. Gunung sampah itu bisa membuat mangrove tidak bisa bernapas dan akhirnya mati. "(Jika ini terjadi), Yang kita takutkan adalah abrasi," kata politikus PAN ini.

Hutan Konservasi Pulau Rambut merupakan salah satu hutan yang tidak boleh dijamah, kecuali untuk penelitian. Kawasan konservasi khusus ini untuk ekosistem yang memiliki ciri khas dan digemari oleh burung laut dan burung darat. Menurutnya, itulah keanekaragaman yang tidak bisa diganggu gugat, kecuali untuk dilestarikan.

Hutan konservasi perlu menjadi perhatian kembali karena sekitar 60 persen hutan di Indonesia mengalami kerusakan.

Ketidakpedulian masyarakat dan pembangunan yang tak memperhatikan lingkungan menjadi salah satu penyebabnya. "Hutan sudah beralih fungsi sebagai kota," katanya.

Hutan Indonesia memiliki luas sekitar 130 juta hektare dari 180 juta hektare luas Indonesia.

Ada 64 juta hektare luas hutan yang sudah dimoratorium dan sekitar 40 persen dalam keadaan baik. Menurut Menhut, peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga hutan.

Hutan terbagi menjadi tiga model, yaitu hutan konservasi, lindung, dan produksi. Ketiganya wajib untuk dilestarikan, seperti kawasan hutan lindung di Puncak, Jawa Barat. Kawasan hutan itu tidak boleh diganggu, hanya boleh diambil manfaatnya karena untuk menyimpan air. Namun, karena keegoisan oknum, hutan tersebut menjadi tidak terawat.

Luas kawasan konservasi di Indonesia kini tinggal 20 juta hektare. Jika tidak ada perhatian dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, luas hutan konservasi akan berkurang, bahkan hilang.

Kewenangan Kemenhut di kawasan Puncak, kata Zulkifli, hanya sembilan persen, sedangkan 91 persen tanggung jawab berada di pundak pemerintah daerah. Karena itu, kerja sama antara pemerintah, warga, dan aparat keamanan untuk menjaga hutan sangat dibutuhkan.

"Sistemnya bukan melarang atau menangkap lagi. Harus ada alternatif. Jika mereka tidak boleh menanam sayur, apa solusinya?" tanya Zulkifli.

Apalagi, sekarang sudah era otonomi daerah. Kewenangan Kemenhut hanya 15 persen untuk menindak pelanggaran hutan.

Sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan aparatnya. Otonomi daerah bagus jika diterapkan dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, pemerintah daerah yang menindak pelanggaran, sementara Kemenhut hanya menjaganya. "Kita hanya menindak pelanggaran di hutan konservasi," katanya.